



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan atas Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Objek
- IV. Laporan Realisasi Anggaran SKPD sesuai PP No 71 Tahun 2010
- V. Neraca Komparatif SKPD
- VI. Laporan Operasional SKPD
- VII. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
- VIII. Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 8.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 8.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, dan PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD SKPD**

2.1. Ekonomi Makro

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, air baku, konservasi sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, agar pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu, menyeruluh dan berwawasan lingkungan.

Kondisi prasarana dan sarana sumber daya air yang ada antara lain meliputi sungai sebanyak 202 buah dan panjang 4.116,89 km. Wilayah sungai berdasarkan peraturan Menteri PURP Nomor 04/PRT/M/2015 tentang criteria dan penempatan wilayah sungai kewenangan pusat (WS Cimanuk Sungai; dimana 6 wilayah Sungai Kewengan Pusat (WS Cimanuk Cisanggarung, WS Serayu Bogowonto dan WS Citanduy), 2 Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten Jepara (WS Wiso Gelis dan WS Karimun Jawa). Terdapat Bendungan Besar, Bendungan Alam, Bendungan Kecil sebanyak 41 buah. Untuk jaringan irigasi, dan keseluruhan luas 978.527 Ha pada 12.315 Daerah Irigasi (DI), seluas 86.865 Ha pada sejumlah 108 DI menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kewenangan Pusat seluas 347.674 Ha pada 33 DI dan kewenangan kabupaten/kota seluas 543.988 Ha pada 12.147 DI.

Bidang Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sampai dengan Tahun 2019, telah dilaksanakan pembahasan terhadap 21 revisi RTRW Kabupaten/Kota serta 2 penyusunan RDTR (Kota Salatiga dan kota Purwokerto). Dari 21 revisi RTTW tersebut 2 telah menjadi Perda Baru yaitu Perda Baru yaitu Perda RTRW Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pematang, 13 Kabupaten/Kota telah mendapatkan rekom namun masih berproses dengan Kementrian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan substansi.

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa terdapat beberapa hambatan/persoalan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Hambatan / Permasalahan

1. Terdapat kegiatan yang tidak selesai 100% di karenakan penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, di karenakan penyedia jasa mengalami kesulitan masalah keuangan, sehingga mengakibatkan terlambatnya progress fisik, bahkan tidak terselesaikannya pekerjaan.
2. Proses persetujuan subtransi Raperda RTR yang membutuhkan waktu lama
3. Terbitnya Peraturan Menteri ATR tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota yang baru, sehingga diperlukan proses penyesuaian kembali atas revisi RTRW serta penyusunan RDTR yang telah dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi BIG yang membutuhkan waktu lama
5. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang disebabkan antara lain karena masih adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang

Solusi

1. Putus kontrak terhadap penyedia jasa
2. Pembinaan kepada kabupaten/kota terkait penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses persetujuan subtanasi, diharapkan dengan kelengkapan dan ketepatan dokumen persyaratan yang baik akan lebih mempercepat proses persetujuan subtanasi
3. Penyesuaian terhadap materi teknis RTR dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN No 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peraturan Menteri ATR/BPN No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
4. Melakukan percepatan konsultasi ke BIG serta meningkatkan kualitas data spasial rencana tata ruang
5. Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang terjadi serta menyebarluaskan informasi terkait tata ruang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholder penataan ruang.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan akuntansi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi mengacu pada Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi menggunakan basis akuntansi basis akrual, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 120 tahun 2016, bahwa SKPD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

4.3.2. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3. Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2018.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas PSDA Provinsi Jawa

Tengah dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam tahun anggaran berjalan.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran.

4.3.13. Ekuitas

Ekuitas dana terdiri dari :

- **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 atau 91,14% dari target Rp4.417.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp Rp4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	91.14%	Rp 4,087,067,916
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	91.14%	Rp 4,087,067,916

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 atau 91,14% dari target Rp4.700.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	-	Rp 4,087,067,916
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	Rp -	-	-
Jumlah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	-	Rp 4,087,067,916

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 atau 91,14% dari target Rp4.700.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	91.14%	4,087,067,916
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	91.14%	Rp 4,087,067,916

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 atau 91,14% dari target Rp4.700.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp 2,646,700,000	Rp 2,742,030,318	103.60%	4,087,067,916
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 2,053,300,000	Rp 1,541,587,500	75.08%	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4,700,000,000	Rp 4,283,617,818	91.14%	Rp 4,087,067,916

5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	Rp -	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-	Rp -

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp289.691.487.936,00 atau 94,01% dari anggaran Rp308.143.267.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp288.481.408.741,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 103,816,522,000	Rp 100,445,823,086	96.75%	Rp 99,192,708,734
Belanja Barang & Jasa	Rp 78,889,476,000	Rp 76,899,234,266	97.48%	Rp 72,636,908,103
Belanja Modal	Rp 125,437,269,000	Rp 112,346,430,584	89.56%	Rp 116,651,791,904
Jumlah	Rp 308,143,267,000	Rp 289,691,487,936	94.01%	Rp 288,481,408,741

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.100.445.823.086,00 atau 96,75% dari anggaran Rp.103.816.522.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.99.192.708.734,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 74,172,538,000	Rp 71,808,968,086	96.81%	Rp 73,258,902,073
Belanja Pegawai langsung	Rp 29,643,984,000	Rp 28,636,855,000	96.60%	Rp 25,933,806,661
Jumlah	Rp 103,816,522,000	Rp 100,445,823,086	96.75%	Rp 99,192,708,734

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp76.899.234.266,00 atau 97,48% dari anggaran Rp78.889.476.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp72.636.908.103,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 5,537,293,000	Rp 5,402,406,700	97.56%	Rp 5,043,877,845
Belanja Bahan/Material	Rp 8,427,656,000	Rp 8,374,524,074	99.37%	Rp 7,125,708,050
Belanja Jasa Kantor	Rp 3,178,725,000	Rp 2,920,508,360	91.88%	Rp 2,523,607,804
Belanja Premi Asuransi	Rp 177,000,000	Rp 162,600,000	91.86%	Rp 92,139,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 1,598,654,000	Rp 1,574,549,140	98.49%	Rp 1,729,337,405
Belanja Cetak dan Pengadaan	Rp 1,339,369,000	Rp 1,303,510,600	97.32%	Rp 1,508,840,150
Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	Rp 136,000,000	Rp 121,125,000	89.06%	Rp 215,102,500
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 165,300,000	Rp 151,070,000	91.39%	Rp 118,000,000
Belanja Sewa Alat Berat	Rp 356,425,000	Rp 337,921,000	94.81%	Rp 296,550,000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 310,000,000	Rp 308,720,000	99.59%	Rp 250,900,000
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 2,314,640,000	Rp 2,136,673,000	92.31%	Rp 1,916,227,000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp 382,605,000
Belanja Pakaian Kerja	Rp 50,000,000	Rp 49,000,000	98.00%	Rp 15,422,000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp -			
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 14,047,790,000	Rp 13,811,443,695	98.32%	Rp 11,877,535,199
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp -	Rp -		Rp -
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 12,000,000	Rp 5,800,000	48.33%	Rp 12,800,000
Belanja Pemeliharaan	Rp 35,761,196,000	Rp 35,223,559,307	98.50%	Rp 35,233,947,250
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 5,033,000,000	Rp 4,635,293,390	92.10%	Rp 4,091,028,900
Belanja Barang & Jasa BLUD	Rp -			
Belanja Hadiah Barang	Rp 38,678,000	Rp 34,780,000	89.92%	Rp 29,030,000
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp 405,750,000	Rp 345,750,000	85.21%	Rp 174,250,000
Jumlah	Rp 78,889,476,000	Rp 76,899,234,266	97.48%	Rp 72,636,908,103

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp112.346.430.584,00 atau 89,56% dari anggaran Rp125.437.269.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp116.651.791.904,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	Rp 5,884,810,000	Rp 154,526,460	2.63%	Rp 3,455,263,530
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 5,320,713,000	Rp 5,146,595,000	96.73%	Rp 2,610,011,000
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 1,483,705,000	Rp 1,183,115,000	79.74%	Rp 1,229,154,000
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 112,710,877,000	Rp 105,825,086,124	93.89%	Rp 109,328,769,374
Belanja Instalasi	Rp 37,164,000	Rp 37,108,000	99.85%	Rp 28,594,000
Jumlah	Rp 125,437,269,000	Rp 112,346,430,584	89.56%	Rp 116,651,791,904

5.1.2.1.3.1. Belanja Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp154.526.460,00 atau 2,63% dari anggaran Rp5.884.810.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.0053.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	Rp 5,884,810,000	Rp 154,526,460	2.63%	Rp 3,455,263,530
Jumlah	Rp 5,884,810,000	Rp 154,526,460	2.63%	Rp 3,455,263,530

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.146.595.000,00 atau 96,73% dari anggaran Rp5.320.713.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.610.011.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	Rp -	Rp -	-	Rp -
Belanja Alat-alat Angkut	Rp 2,781,855,000	Rp 2,627,768,000	94.46%	Rp 275,616,000
Belanja Alat-alat Bengkel	Rp 1,897,161,000	Rp 1,877,185,000	98.95%	Rp 535,620,000
Belanja Alat-alat Pertanian	Rp -	Rp -	-	Rp -
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 568,447,000	Rp 568,392,000	99.99%	Rp 1,400,585,000
Belanja Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 73,250,000	Rp 73,250,000	100.00%	Rp 398,190,000
Belanja Alat-alat Kedokteran	Rp -	Rp -	-	Rp -
Belanja Alat-alat Laboratorium	Rp -	Rp -	-	Rp -
Belanja Alat-alat Keamanan	Rp -	Rp -	-	Rp -
Jumlah	Rp 5,320,713,000	Rp 5,146,595,000	96.73%	Rp 2,610,011,000

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.183.115.000,00 atau 79,74% dari anggaran Rp1.483.705.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.229.154.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	1,483,705,000	1,183,115,000	79.74%	1,229,154,000
Belanja Monumen	-		-	-
Jumlah	1,483,705,000	1,183,115,000	79.74%	Rp 1,229,154,000

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp105,862.193.824,00 atau 93,89% dari anggaran Rp112.748.041.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp109,328,769,324,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	Rp -		-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	Rp 112,710,877,000	Rp 105,825,085,824	93.89%	Rp 109,328,769,324
Belanja Instalansi dan Jaringan	Rp 37,164,000	Rp 37,108,000	99.85%	Rp 28,594,000
Jumlah	Rp 112,748,041,000	Rp 105,862,193,824	93.89%	Rp 109,357,363,324

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar minus Rp285.407.870.118,00, sedangkan Tahun 2018 minus sebesar Rp284.394.340.825,00.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.082.700.398.430,43 naik sebesar Rp.70.774.868.522,65 atau 0,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.011.925.529.907,78

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.576.936.719,00 naik sebesar Rp567,191,523.00 atau 56,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.009.745.196,00.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp100.500,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 100.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2019	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	100,500.00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	-	100,500.00

5.2.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2019 adalah *nihil*.

Saldo Kas tahun 2018 tersebut telah disetor ke rekening kas daerah pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sisa TU	Setor 2019			Setor 2018		
			No STS	Tgl Setor	Nominal	No STS	Tgl Setor	Nominal
1	SPJ TU September 2018, Kegiatan pengembangan, pengelolaan & konservasi sungai, danau dan SDA lainnya	11,855,500	-	-	-	065/STS PPT/IX /2018	28-09-2018	11,855,000
2	SPJ TU Nopember 2018, Kegiatan pengembangan, pengelolaan & konservasi sungai, danau dan SDA lainnya	27,625,397	-	-	-	081/STS PPT/XI /2018	30-11-2018	27,525,398

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019, namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2019 sebesar Rp162.600.000,00, naik sebesar Rp85.817.500,00 atau 211,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp76.782.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019	2018
Asuransi BMD	162,600,000.00	76,782,500.00
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
	162,600,000.00	76,782,500.00

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp981.816.775,00, turun sebesar Rp518.236.944,00 atau 65,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.500.053.719,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	861,000	62,224,800
Persediaan Bahan/Material	980,955,775	1,431,204,219
Persediaan Cetak	-	6,624,700
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	981,816,775	1,500,053,719

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.493.574.244.920,00 naik sebesar Rp127.974.720.581,00 atau 2,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.365.779.524.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	5,365,779,524,339.00
Penambahan	
Belanja Modal	137,174,554,084.00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	222,579,372.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	500,000.00
Koreksi	-
Jumlah	137,397,633,456.00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	64,192,875.00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1,044,000,000.00
Mutasi Keluar	201,670,000.00
Koreksi	8,293,050,000.00
Jumlah	9,602,912,875.00
Saldo Akhir	5,493,574,244,920.00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal selama Tahun 2018 sebesar 116.651.791.904,00.

- ✓ Mutasi masuk merupakan hadiah berupa 3 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp823.277.314
- ✓ Reklas masuk selama tahun 2018 sebesar Rp618.786.002,00 karena perbedaan kategori aset antara anggaran dengan pengurus aset/barang.
- ✓ Koreksi masuk merupakan temuan pemeriksa atas 90 bidang tanah yang belum ada nilainya, dan di tahun 2018 sudah dilakukan penilaian berdasarkan NJOP yaitu sebesar Rp121.127.180.000,00.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Reklas keluar selama tahun 2018 sebesar Rp618.786.002,00 karena perbedaan kategori aset antara anggaran dengan pengurus aset/barang.
- ✓ Reklasifikasi keluar asset lainnya sebesar Rp3.112.917.162,00.
- ✓ Koreksi keluar sebesar Rp8.293.050.000,00.

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.365.779.524.339,00 naik sebesar Rp116.087.723.530,00 atau 2,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.365.779.524.339,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah	Rp 5,365,779,524,339	Rp 2,046,600,000	Rp -	Rp 5,367,826,124,339
Jumlah	Rp 5,365,779,524,339	Rp 2,046,600,000	Rp -	Rp 5,367,826,124,339

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	6,219,521,714,098.00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	112,346,430,584.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	1,533,420,500.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	528,493,000.00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	500,000.00
Koreksi	Rp	22,356,118,000.00
Jumlah	Rp	136,764,962,084.00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	18,620,000.00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	528,493,000.00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	5,534,947,500.00
Mutasi Keluar	Rp	17,275,034,000.00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	23,357,094,500.00
Saldo Akhir		<u><u>6,332,929,581,682.00</u></u>

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember sebesar Rp48.365.661.837,00 naik sebesar Rp321.931.952,00 atau 0,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp48.043.729.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Alat Berat	22,390,489,615.00	-		22,390,489,615.00
Alat Angkut	6,161,863,802.00	275,616,000.00		6,437,479,802.00
Alat Bengkel dan Ukur	1,497,252,000.00	535,620,000.00		2,032,872,000.00
Alat Pertanian dan Peternakan	-			-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,245,074,802	686,030,000.00		8,931,104,802.00
Alat Studio dan Komunikasi	2,312,113,200.00	398,190,000.00		2,710,303,200.00
Alat Kedokteran	-			-
Alat Laboratorium	2,476,494,355.00			2,476,494,355.00
Alat Keamanan	7,335,400.00			7,335,400.00
Alat Komputer	4,953,106,711	714,555,000.00		5,628,561,711
Jumlah	48,043,729,885.00	1,895,456,000.00	-	50,614,640,885.00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari:

Saldo Awal	48,043,729,885.00
Penambahan	
Belanja Modal	2,610,011,000.00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	823,277,314.00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	241,550,002.00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	
Koreksi	
Jumlah	3,674,838,316.00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Mutasi Keluar	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	241,550,002.00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	3,111,356,362.00
Mutasi Keluar	-
Koreksi	
Jumlah	3,352,906,364.00
Saldo Akhir	48,365,661,837.00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.050.379.375,00,00 naik sebesar Rp1.606,390,000,00 atau 8,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.443.989.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	18,281,850,000.00	1,606,390,000.00		19,888,240,000.00
Monumen	286,009,000.00			286,009,000.00
Menara	153,000,000.00			153,000,000.00
Tugu Titik Kontrol	723,130,375.00			723,130,375.00
Jumlah	19,443,989,375.00	1,606,390,000.00	-	21,050,379,375.00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	19,443,989,375.00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	1,229,154,000.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	377,236,000.00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	1,606,390,000.00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	21,050,379,375.00

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp781.659.800.108,00 naik sebesar Rp108.980.127.374,00 atau 16,20,% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp679.672.734,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan	Rp -			Rp -
Bangunan Air / Irigasi	Rp 672,243,705,167	Rp 109,328,769,374	Rp 377,236,000	Rp 781,195,238,541
Instalasi	Rp 435,967,567	Rp 28,594,000		Rp 464,561,567
Jaringan	Rp -			Rp -
Jumlah	Rp 672,679,672,734	Rp 109,357,363,374	Rp 377,236,000	Rp 781,659,800,108

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	672,679,672,734.00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	109,357,363,374.00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk		
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap		
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	109,357,363,374.00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	377,236,000.00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	377,236,000.00
Saldo Akhir	Rp	781,659,800,108.00

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.412.066,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp87.972.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	Rp 87,972,866	Rp -	Rp 1,560,800	Rp 86,412,066
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 87,972,866	Rp -	Rp 1,560,800	Rp 86,412,066

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	87,972,866.00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	1,560,800.00
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	1,560,800.00
Saldo Akhir	Rp	86,412,066.00

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.579.936.373,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.579.936.373,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 2,579,936,373	Rp -	Rp -	Rp 2,579,936,373
Jumlah	Rp 2,579,936,373	Rp -	Rp -	Rp 2,579,936,373

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Kegiatan /Pekerjaan	Lokasi	Realisasi	Fisik (100%)
1				
2				
3				
4				
	Jumlah		Rp -	

5.2.1.2.7. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.575.511.369,00 naik sebesar Rp3.038.989.162,00 atau 197,78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.536.522.2017,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Alat-alat Besar	Rp 3,280,976,362	Rp 3,111,356,362		Rp 6,392,332,724
Alat-alat Angkutan	Rp 443,640,000			Rp 443,640,000
Alat-alat Bengkel	Rp 51,850,000			Rp 51,850,000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 632,906,857			Rp 632,906,857
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 162,672,000			Rp 162,672,000
Alat-alat Laboratorium	Rp 1,750,000			Rp 1,750,000
Alat-alat Keamanan	Rp 155,350			Rp 155,350
Bangunan Gedung	Rp -		Rp 73,928,000	-Rp 73,928,000
Aset Tetap Lainnya	Rp 1,560,800			Rp 1,560,800
Jumlah	Rp 4,573,950,569	Rp 3,111,356,362	Rp 73,928,000	Rp 7,612,939,731

5.2.1.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp209.213.764.452,24 naik sebesar Rp37.674.730.78,23 atau 21,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp171.539.033.667,01 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2019	2018
Alat-alat Besar	Rp 15,785,140,496.00	Rp 14,382,847,334.50
Alat-alat Angkut	Rp 5,571,289,089.15	Rp 4,772,703,888.13
Alat-alat Bengkel dan Ukur	Rp 1,437,606,399.40	Rp 991,391,699.40
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 7,120,726,140.00	Rp 6,241,031,460.80
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1,447,247,050.00	Rp 1,218,170,350.00
Alat Laboratorium	Rp 1,495,645,627.91	Rp 1,246,419,040.54
Alat Keamanan	Rp 5,953,500.00	Rp 5,953,500.00
Alat Komputer	Rp 4,681,120,215.00	Rp 3,970,802,982.00
Bangunan Gedung	8,834,921,925.13	8,423,995,143.43
Bangunan Monumen	Rp 53,311,840.00	Rp 47,591,660.00
Bangunan Menara	Rp 9,180,000.00	Rp 6,120,000.00
Bangunan Tugu Titik	Rp 180,299,767.50	Rp 165,837,160.00
Bangunan Irigasi	Rp 208,038,814,209.26	Rp 167,629,877,939.77
Buku dan Perpustakaan	Rp -	Rp 111,022,293.67
Instalasi	Rp 123,876,921.32	Rp -
Jumlah	Rp 254,785,133,180.67	Rp 209,213,764,452.24

5.2.1.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.535.744.788,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.536.522.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2018	2017
Alat-alat Besar	Rp 3,280,976,362.00	Rp 169,620,000.00
Alat-alat Angkutan	Rp 443,640,000.00	Rp 443,640,000.00
Alat-alat Bengkel	Rp 51,850,000.00	Rp 51,850,000.00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 632,906,857.00	Rp 632,906,857.00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 162,672,000.00	Rp 162,672,000.00
Alat-alat Laboratorium	Rp 1,750,000.00	Rp 1,750,000.00
Alat-alat Keamanan	Rp 155,350.00	Rp 155,350.00
Bangunan Gedung	Rp -	Rp 73,928,000.00
Aset Tetap Lainnya	Rp 1,560,800.00	Rp 1,560,800.00
Jumlah	Rp 4,575,511,369.00	Rp 1,536,522,207.00

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.084.759.864.711.43,00 naik sebesar Rp72.834.334.803,65 atau 1,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.011.924.552.445,76.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama Tahun Anggaran 2019. Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 naik sebesar Rp196.549.902,00 atau 4,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019	2018
Pendapatan Asli daerah	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp -	
Jumlah	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 naik sebesar Rp196.549.902 atau 4,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019	2018
Pendapatan Asli daerah	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.283.617.818,00 naik sebesar Rp196.549.902,00 atau 4,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.087.067.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2019	2018
Retribusi Jasa Umum	Rp -	Rp -
Retribusi Jasa Usaha	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 4,283,617,818.00	Rp 4,087,067,916.00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp,00 naik/turun 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut :

Ketrangan	2019	2018
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Jumlah	-	-

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. beban tahun anggaran 2019 sebesar Rp223.291.630.932,35 naik sebesar Rp9.103.922.935,77 atau 4.51% dibandingkan beban tahun anggaran 2017 sebesar Rp202.083.206.930,46.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp223.291.630.932,35 naik sebesar Rp12.104.501.066,12 atau 17,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp211.187.129.866,23

Keterangan	2019	2018
Beban Pegawai	100,445,823,086.00	99,192,708,734.00
Beban Persediaan	14,378,947,718.00	12,035,612,705.00
Beban Jasa	12,366,466,057.92	7,581,267,371.00
Beban Pemeliharaan	36,798,108,447.00	36,963,284,655.00
Beban Perjalanan Dinas	13,811,443,695.00	11,877,535,199.00
Beban Penyusutan/Amortisasi	45,472,221,928.43	39,924,604,052.23
Beban Lain-lain	18,620,000.00	3,612,117,150.00
Jumlah	223,291,630,932.35	211,187,129,866.23

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.443.952.086,00 naik sebesar Rp2.155.166.783,00 atau 2,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp97.044.015.230,00.

Keterangan	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	71,808,968,086.00	73,260,430,513.00
Beban Pegawai Langsung	28,634,984,000.00	25,938,751,500.00
Jumlah	100,443,952,086.00	99,199,182,013.00

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.378.947.718,00 naik sebesar Rp2.343.335.013 atau 1,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.035.612.705,00 .

Keterangan	2019	2018
Beban Persediaan Barang Habis Pakai	5,470,395,200.00	5,034,705,995.00
Beban Bahan/Material	8,824,772,518.00	6,573,849,710.00
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	-	382,605,000.00
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	-	-
Beban Pakaian Kerja	49,000,000.00	15,422,000.00
Beban Hadiah Barang	34,780,000.00	29,030,000.00
Jumlah	14,378,947,718.00	12,035,612,705.00

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.574.732.457,92,00 naik sebesar Rp993.465.086,92,00 atau 1,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.581.267.371,00.

Keterangan	2019	2018
Beban Jasa Kantor	2,920,508,360.00	2,523,607,804.00
Beban Premi Asuransi	100,094,707.92	86,078,167.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	121,125,000.00	215,102,500.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	151,070,000.00	118,000,000.00
Beban Sewa Alat Berat	337,921,000.00	296,550,000.00
Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	308,720,000.00	250,900,000.00
Beban Jasa Konsultansi	4,635,293,390.00	4,091,028,900.00
Jumlah	8,574,732,457.92	7,581,267,371.00

5.3.2.1.4. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.798.108.447,00 menurun sebesar Rp160.231.369,00 atau minus 1,04 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp36.958.339.816,00.

Keterangan	2019	2018
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1,574,549,140.00	1,729,337,405.00
Beban Pemeliharaan	35,223,559,307.00	35,229,002,411.00
Jumlah	36,798,108,447.00	36,958,339,816.00

5.3.2.1.5. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.811.443.695,00 naik sebesar Rp1.933.908.496,00 atau naik 1,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.877.353.199,00.

Keterangan	2019	2018
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,398,573,720.00	8,884,311,606.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,542,529,547.00	1,526,794,783.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1,870,340,428.00	1,466,428,810.00
Jumlah	13,811,443,695.00	11,877,535,199.00

5.3.2.1.6. **Beban Penyusutan/Amortisasi Aset**

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.472.221.928,43 naik sebesar Rp5.547.617.876,21 atau 11,39% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp39.924.604.052,23

Keterangan	2019	2018
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	4,538,455,562.09	4,124,280,863.60
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	511,975,469.20	476,317,143.01
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	40,421,790,897.14	35,283,128,514.62
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	40,877,531.00
Jumlah	45,472,221,928.43	39,924,604,052.23

5.3.2.1.7. **Beban Lain-lain**

Beban lain-lain Per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.612.117.150,00 menurun sebesar Rp29.305.031,00 atau minus 0,80% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.448.762.181,00.

Keterangan	2019	2018
Beban Barang dan Jasa	-	3,612,117,150.00
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Lain-Lain	18,620,000.00	-
Jumlah	18,620,000.00	3,612,117,150.00

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	
1	Ekuitas Awal	Rp	6,011,925,529,907.78
2	Surplus/Defisit - LO	Rp	(219,008,013,114.35)
3	RK PPKD	Rp	285,407,669,118.00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp	6,434,678,800.00
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	Rp	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Lainnya	Rp	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	Rp	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	Rp	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	Rp	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap:	Rp	1,080,057,000.00
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	Rp	1,533,420,500.00
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	-
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	500,000.00
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	Rp	22,356,118,000.00
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	Rp	-
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	-
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	(5,534,947,500.00)
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari mutasi antar SKPD	Rp	(17,275,034,000.00)
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan:	Rp	(89,725,700.00)
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	Rp	(223,079,375.00)
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp	133,353,675.00
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	Rp	5,444,347,500.00
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi/koreksi dari Aset Tetap	Rp	5,534,947,500.00
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	Rp	(500,000.00)
	Koreksi/Penyesuaian kurang Reklasifikasi Pemanfaatan	Rp	(90,100,000.00)
5	Ekuitas Akhir	Rp	6,084,759,864,711.43

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai strategi dan kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekat menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam

penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan provinsi sehingga banyak fasilitas Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh kabupaten/kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan merumuskan Perencanaan Stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Struktur Organisasi

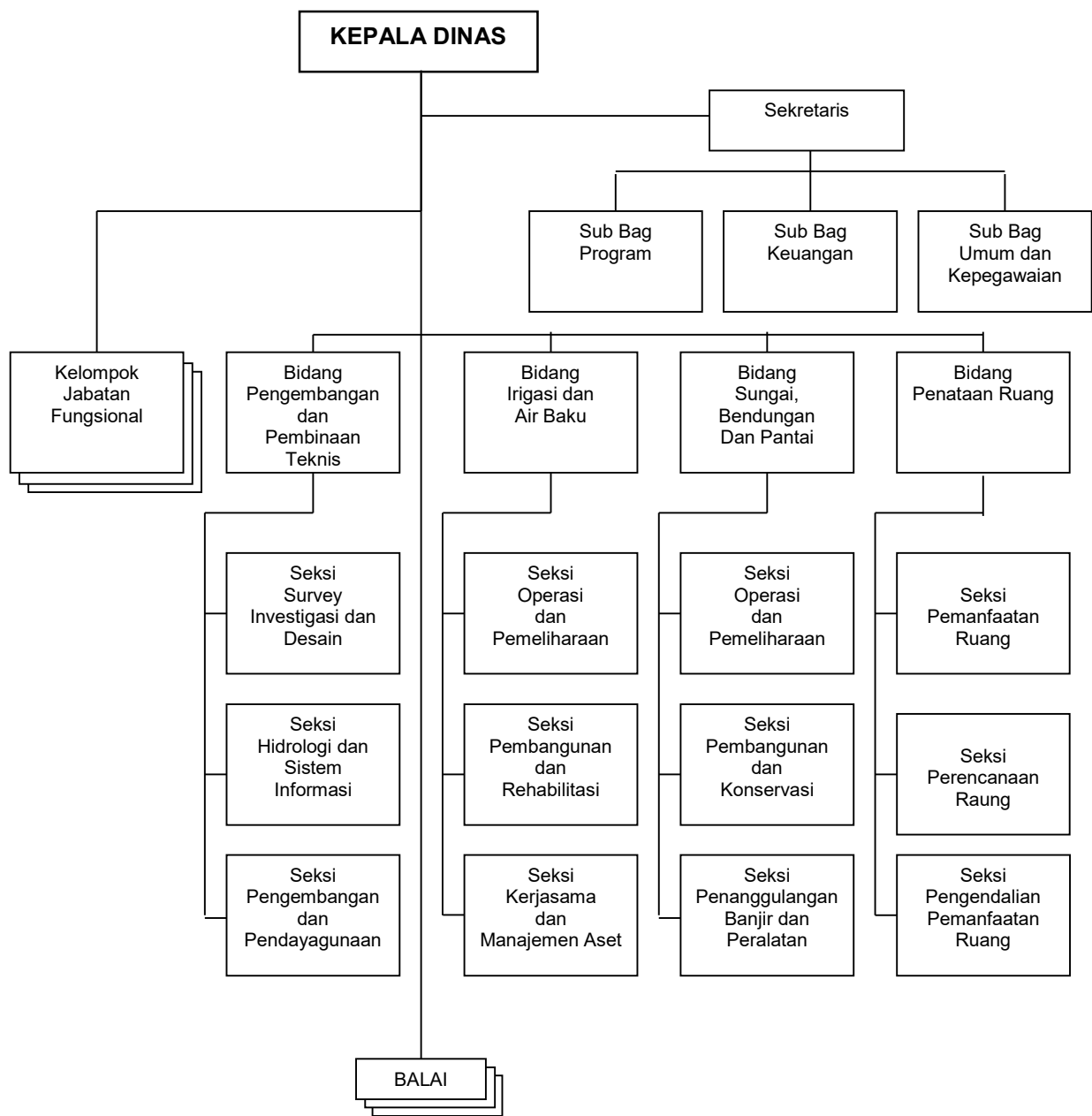
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis (PPT), terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Survey, Investigasi dan Desain
 2. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi

3. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan

- d. Bidang Irigasi dan Air Baku (IAB), terdiri dari 2 seksi:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi
 - 3. Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset
- e. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai (SBP), terdiri dari 3 seksi:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Konservasi
 - 3. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 3 seksi:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - 2. Seksi Perencanaan Ruang
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- g. UPTD, terdiri dari :
 - 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 - 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
 - 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
 - 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
 - 5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
 - 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH



6.4. Visi dan Misi

6.4.1. Visi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi:

"Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat".

6.4.2. Misi

- 1). Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi Sumber Daya Air secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2). Mewujudkan pengembangan Sumber Daya Air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA.
- 3). Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
- 4). Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- 5). Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

6.5. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional khususnya pengelolaan Irigasi/Rawa, Sungai sebagai berikut :

6.5.1. Pengelolaan Irigasi/Rawa

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah.

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/23/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

6.5.2. Pengelolaan Sungai

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Permen PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan Jo. Kepmen Kimpraswil Nomor 296 /KPTS /2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

BAB 7 PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SREKO YUNANTO, SP.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SPJ Fungsional Per 31 Desember 2019
2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
3. Bukti Setor Kekurangan Pengembalian TU
4. Copy Polis Asuransi Aset Daerah
5. Laporan Mutasi Aset /Barang Milik Daerah Tahun 2019
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2019